

**ANALISIS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN
DI DAERAH 3T PROVINSI RIAU KABUPATEN LINGGA**



Disusun Oleh:

Asyifa Maharani (2356041025)

Mandiri A

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

202

I. PENDAHULUAN

Daerah 3T adalah daerah yang tergolong dalam daerah “tertinggal, terdepan, dan terluar”. Teringgal berarti memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Provinsi Kepulauan Riau adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia bagian barat yang langsung berbatasan dengan negara luar. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah utara Laut Natuna Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia) di sebelah timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan. Juga berbatasan langsung dengan negara Singapura, tiga negara bagian Malaysia Barat (Terengganu, Pahang, dan Johor) dan Provinsi Riau di sebelah barat. Salah satu Kabupaten yang wajib untuk dihimbau perkembangannya adalah Kabupaten Lingga pada Provinsi Riau, dimana kabupaten ini merupakan kabupaten yang cukup tertinggal terkait pelayanan publiknya, salah satunya pada bidang pendidikan.

Muhammad (2022) dalam Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai kabupaten baru diantara kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau tentu harus melakukan berbagai hal untuk mengejar ketertinggalannya. Apalagi Kabupaten Lingga secara geografis termasuk dalam kategori tertinggal. Ketertinggalan ini disebabkan Lokasi Kabupaten Lingga yang sulit untuk diakses (kepulauan) serta tidak tersedianya akses (transportasi) yang regular baik transportasi laut maupun udara”. Dikutip dari RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021 dalam Bab 4 Isu-Isu Strategis, “Masalah pendidikan merupakan masalah yang paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lingga”.

II. PEMBAHASAN

Pelayanan publik menjadi fokus utama yang akan dibahas dan terus ditingkatkan guna untuk membuat Kabupaten Lingga di Riau menjadi kabupaten yang tidak tertinggal lagi. Adapun beberapa layanan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga antara lain:

1. Pengelolaan dan pengawasan sekolah-sekolah negeri, baik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) maupun pendidikan menengah (SMA).

Dikutip dalam buku "Manajemen Pendidikan di Indonesia" oleh Mulyasa (2021), dituliskan bahwa salah satu yang menjadi tugas utama dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota adalah mengelola dan mengawasi jalannya system belajar di sekolah-sekolah negeri, dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga Tingkat menengah.

2. Penyediaan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah-sekolah di Kabupaten Lingga.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Susanti dan Nurjaman (2019), penyediaan tenaga kerja pendidik yang berkompeten dan berkualitas menjadi salah satu tantangan sulit bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga, dalam menyediakan tenaga pendidik tersebut, terkhusus di daerah-daerah kepulauan terpencil.

3. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, buku pelajaran, dan fasilitas penunjang lainnya.

Sari dan Rahmawati (2020), menyebutkan bahwa sebagian besar sekolah di daerah terpencil di Kabupaten Lingga mengalami masalah yang serius seperti kurangnya ruang kelas sebagai tempat belajar, tidak adanya ketersediaan buku pelajaran, dan peralatan penunjang pembelajaran lainnya seperti alat tulis.

4. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Dikutip dalam buku "Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan" oleh Suparno (2019), disebutkan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan bagi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu tugas utama yang harus dilakukan, dilaksanakan, dan ditaati oleh dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

5. Penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Syahril (2021), disebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil adalah dengan membuat kurikulum dan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

Teori Resources Allocation Models (Hackman & Oldham, 1976):

a. Variasi Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga memiliki tugas yang beragam dalam mengelola layanan pendidikan, mulai dari pengelolaan sekolah, penyediaan tenaga

pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, hingga pengembangan kurikulum dan program pendidikan non-formal. Namun, variasi tugas ini seringkali terhambat oleh kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan keterbatasan akses dan infrastruktur di daerah terpencil. Variasi tugas dalam pengelolaan layanan pendidikan di Kabupaten Lingga sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Kabupaten Lingga yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil menyebabkan terbatasnya akses dan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Syahril (2021), salah satu tantangan utama dalam menyediakan layanan pendidikan di daerah terpencil di Kabupaten Lingga adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Banyak pulau-pulau kecil yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Hal ini menyebabkan variasi tugas dalam pengelolaan layanan pendidikan menjadi terbatas. Kurangnya infrastruktur pendidikan di Kabupaten Lingga inilah yang menjadi fokus utama tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengajar di daerah tersebut. Adapun hal lainnya yang mempengaruhi adalah ketiadaan akses menuju sekolah-sekolah di daerah kepulauan terpencil Kabupaten Lingga yang menjadi kendala dalam penyediaan layanan pendidikan. Infrastruktur dan mobilitas transportasi yang terbatas menyulitkan mobilitas tenaga pendidik dan penyaluran fasilitas pendidikan ke daerah-daerah tersebut menjadi sulit dan terhambat.

b. Identitas Tugas

Tugas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga adalah menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat di wilayahnya, termasuk di daerah kepulauan terpencil. Identitas tugas ini jelas memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan SDM di Kabupaten Lingga. Namun, terkadang sulit untuk mengidentifikasi tugas-tugas spesifik di daerah kepulauan terpencil karena keterbatasan akses.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Susanti dan Nurjaman (2019), identitas tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas sangat penting untuk mendukung infrastruktur pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik di wilayah kepulauan terpencil. Namun, identifikasi tugas-tugas spesifik seringkali terhambat oleh kondisi

geografis yang sulit dijangkau. Geografis Kabupaten Lingga yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan jarak tempuh antar pulau menjadi jauh dan memakan waktu yang lama. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi alam yang ekstrem di Kabupaten Lingga, seperti pegunungan yang curam atau perairan yang berbahaya, Dimana kondisi ini menyulitkan akses transportasi dan distribusi logistik, serta membutuhkan persiapan yang khusus dan matang untuk dapat menjangkau daerah tersebut.

c. Signifikansi Tugas

Layanan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga memiliki signifikansi yang sangat penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan sumber daya manusia dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lingga, termasuk di daerah kepulauan terpencil. Namun, signifikansi tugas ini terkadang terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya. Signifikansi tugas ini sangat penting dan tidak boleh hilang di wilayah kepulauan terpencil, dimana akses terhadap pendidikan berkualitas seringkali terbatas dan membuat anak-anak di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Susanti dan Nurjaman (2019), signifikansi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas sangat penting untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Namun, signifikansi tugas ini seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga untuk meningkatkan layanan pendidikan, antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana pendidikan yang sudah tersedia, mengalokasikan anggaran secara efisien dan prioritas untuk kebutuhan mendesak, menjalin sebuah kerjasama dengan pemerintah pusat atau provinsi untuk mendapatkan bantuan anggaran dan fasilitas pendidikan, lalu mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut, meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan taraf profesional secara berkala, selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan terakhir

membentuk sebuah komite sekolah atau forum pendidikan yang melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat.

d. Otonomi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga memiliki otonomi yang terbatas dalam mengelola layanan pendidikan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan adanya aturan dan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi yang harus dipatuhi. Meskipun demikian, pihak dinas memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan implementasi layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kepulauan. Menurut jurnal yang ditulis oleh Susanti dan Nurjaman (2020), otonomi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga dalam mengelola layanan pendidikan di wilayahnya cukup terbatas, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pengadaan sumber daya. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi seringkali menjadi kendala dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

e. Umpan Balik

Dikutip dari Sari dan Rahmawati (2023), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga belum memiliki sistem umpan balik yang terstruktur dan komprehensif dalam mengevaluasi kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Meskipun terdapat mekanisme pengaduan dan saran dari masyarakat, belum ada sistem yang efektif dalam mengumpulkan dan merespon umpan balik tersebut secara sistematis dan teratur, terutama dari daerah kepulauan terpencil. Hal yang dapat diupayakan agar masyarakat dapat memberikan umpan balik yang baik adalah dengan seperti membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis umpan balik dari berbagai sumber, memanfaatkan teknologi komunikasi seperti pesan singkat, aplikasi pesan instan, atau video conference untuk menjangkau daerah terpencil, dan melakukan kunjungan rutin ke daerah kepulauan terpencil untuk mengumpulkan umpan balik secara langsung.

III. Kesimpulan

Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil yang menyebabkan terbatasnya akses dan infrastruktur untuk menuju daerah terpencil itu. Akan tetapi hal itu tidak membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tenaga pendidik dan kependidikan Kabupaten Lingga malas dan membiarkan ketiadaan

pendidikan dalam penyediaan layanan berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak yang membutuhkan sekolah dan belajar di wilayahnya, termasuk di daerah kepulauan terpencil. Namun, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan anggaran, dan sumber daya menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Meskipun Kabupaten Lingga memiliki otonomi yang terbatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lingga berupaya menyesuaikan implementasi layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kepulauan. Namun, sistem umpan balik yang terstruktur dan komprehensif dalam mengevaluasi kualitas layanan pendidikan belum tersedia, terutama di daerah terpencil dengan berupaya meningkatkan layanan pendidikan di daerah tersebut seperti dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, mengalokasikan anggaran secara efisien, menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat atau provinsi, mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Siam, N. U. (2020). Analisis Potensi Desa dalam Pembangunan Desa sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Kepulauan Riau-indonesia). JISIPOL (JURNAL STISIPOL) RAJA HAJI TANJUNGPINANG VOL. 2 NO. 1.
- BAB 4 ISU – ISU STRATEGIS. RPJMD KABUPATEN LINGGA (2016-2021).
- Syahril, S. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Pendidikan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 5(1), 12-22.
- Sari, N. P., & Rahmawati, A. (2020). Tantangan Penyediaan Layanan Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Studi Kasus Kabupaten Lingga, Riau. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(2), 98-107.
- Susanti, E., & Nurjaman, K. (2019). Infrastruktur Pendidikan di Daerah Tertinggal: Studi Kasus Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-56.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparno, P. (2019). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. S. (2022). DIGITALISASI LAYANAN, UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh.